

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Investasi

Secara makroekonomis, investasi memiliki dua fungsi utama. Pertama, investasi berperan sebagai komponen pengeluaran yang signifikan dan relatif berjangka panjang, sehingga perubahan yang terjadi pada tingkat investasi akan memberikan dampak substansial terhadap permintaan agregat, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat output serta kesempatan kerja. Kedua, investasi menjadi mendorong utama akumulasi modal fisik, seperti peningkatan stok bangunan, infrastruktur, serta peralatan produksi, yang secara langsung meningkatkan kapasitas output potensial suatu negara dan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, investasi memiliki pengaruh yang penting terhadap output jangka panjang melalui mekanisme pembentukan modal yang berdampak pada peningkatan penawaran agregat dan produktivitas nasional.

Menurut Mankiw (2006:453), investasi merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling fluktuatif. Selama periode resesi, ketika pengeluaran terhadap barang dan jasa mengalami penurunan, sebagian besar kontraksi tersebut disebabkan oleh turunnya aktivitas investasi. Sementara itu, Sukirno (2013:121) menyatakan bahwa investasi adalah pengeluaran modal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh barang-barang modal dan

perlengkapan produksi guna memperluas kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa di dalam perekonomian.

Berdasarkan uraian teori di atas, secara ringkas investasi dapat dipahami sebagai tambahan bersih terhadap stok modal yang telah ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep investasi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*). Dengan demikian, dalam konteks makroekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal memiliki makna yang berbeda dengan modal itu sendiri (*capital*).

Dalam analisis makroekonomi, investasi umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu investasi tetap (*fixed investment*) dan investasi persediaan (*inventory investment*). Selanjutnya, investasi tetap dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) dan investasi residensial (*residential investment*). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran yang beragam dalam perekonomian, sehingga perlu dipahami lebih lanjut melalui pendekatan teori ekonomi.

Teori Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) menjelaskan bahwa perekonomian tidak selalu berada pada kondisi keseimbangan penuh secara otomatis. Fluktuasi permintaan agregat dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti pengangguran dan resesi, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter (Meiriza et al., 2024). Dalam konteks ini, investasi

dipandang sebagai komponen penting yang dipengaruhi oleh kondisi permintaan agregat dalam perekonomian.

Lebih lanjut, dalam kerangka Keynesian, pemerintah dapat memengaruhi investasi melalui kebijakan seperti peningkatan pengeluaran publik dan penurunan suku bunga guna merangsang permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pengendalian pengeluaran dan kebijakan pajak digunakan untuk menjaga stabilitas saat terjadi tekanan inflasi. Perkembangan teori ini juga mengarah pada pentingnya investasi berkelanjutan, seperti pada sektor energi terbarukan dan infrastruktur hijau, yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan jangka panjang (Lase et al., 2024).

2.1.1.1 Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan tingkat pendapatan nasional yang dicapai, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi otonom (*autonomous investment*) dan investasi terpengaruh (*induced investment*). Investasi otonom merupakan jenis investasi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat pendapatan nasional, sehingga besar kecilnya pendapatan nasional tidak berpengaruh terhadap jumlah investasi yang dilakukan oleh sektor usaha. Dengan kata lain, keputusan investasi bersifat independen terhadap fluktuasi pendapatan nasional. Sebaliknya, investasi terpengaruh merupakan investasi yang bergantung pada tingkat pendapatan nasional, di mana besarnya investasi berfungsi sebagai fungsi linier dari pendapatan nasional. Artinya, peningkatan pendapatan nasional akan diikuti oleh peningkatan investasi, meskipun dalam proporsi yang relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan

pendapatan tersebut. Oleh karena itu, investasi jenis ini bersifat endogen terhadap pendapatan nasional.

Berdasarkan asal negara penanam modal, investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau *Domestic Investment* dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Investment*.

1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dijelaskan terlebih dahulu definisi mengenai modal dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa modal dalam negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun pihak swasta yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, sepanjang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya, disebutkan bahwa pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 dapat berupa perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan kekayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk

menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

2) Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang dimaksud dengan PMA adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengelola dan menjalankan suatu perusahaan di wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, pemilik modal menanggung secara langsung risiko yang timbul dari kegiatan investasi tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan modal asing mencakup beberapa bentuk, antara lain:

- a) Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, namun digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan di Indonesia dengan persetujuan pemerintah.
- b) Sarana dan peralatan perusahaan, termasuk penemuan baru milik pihak asing serta bahan-bahan yang didatangkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia, sepanjang pembiayaannya tidak bersumber dari kekayaan dalam negeri.
- c) Bagian dari hasil usaha yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk ditransfer ke luar negeri, tetapi digunakan kembali untuk membiayai kegiatan perusahaan di Indonesia.

Lebih lanjut, Penanaman Modal Asing (PMA) dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan ketersediaan modal yang bersumber dari luar negeri guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut Suryatno (2003:72), PMA dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- a) Investasi portofolio (*portofolio investment*), yaitu investasi yang berfokus pada kepemilikan aset-aset finansial seperti saham dan obligasi yang bernilai dalam mata uang nasional. Investasi jenis ini umumnya dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, dan lembaga dana pensiun.
- b) Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), yaitu investasi dalam bentuk kepemilikan aset nyata seperti pembangunan fasilitas produksi, pengadaan barang modal, serta pembelian lahan untuk kegiatan produksi dan operasional perusahaan.

2.1.2 Belanja Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja diartikan sebagai seluruh pengeluaran kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran tertentu. Belanja pemerintah merupakan bentuk implementasi dari rencana kerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), berbagai alokasi belanja negara menjadi salah satu komponen yang dapat mengurangi kekayaan negara. Secara umum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola APBN dengan cara mengalokasikan dan merealisasikan belanja, baik untuk pemerintah pusat maupun

daerah, sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Selain itu, belanja pemerintah juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas investasi dalam perekonomian.

Meskipun dalam identitas pendapatan nasional investasi dan belanja pemerintah merupakan komponen yang secara bersama-sama membentuk output (Y), pada analisis ekonomi makro belanja pemerintah juga dapat memengaruhi investasi. Dalam pendekatan ekonomi makro Keynesian, konsep *crowding in effect* menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menjadi stimulus bagi aktivitas investasi, terutama di negara berkembang (Ahmed & Miller, 1999). Fenomena *crowding in* terjadi ketika kondisi perekonomian berada pada tingkat pemanfaatan sumber daya yang belum optimal (*underemployment*), sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah tidak menimbulkan tekanan terhadap sektor swasta. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber daya oleh pemerintah tidak mengurangi ketersediaan faktor produksi bagi sektor swasta serta tidak mendorong kenaikan biaya modal. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran pemerintah justru mampu meningkatkan permintaan barang dan jasa kemudian nantinya memperbaiki iklim usaha, yang pada akhirnya mendorong peningkatan investasi (Sobandi, 2019).

Lebih lanjut, Ahmed & Miller (1999) menekankan bahwa efek *crowding in* sangat berkaitan dengan pola alokasi pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran yang bersifat produktif pada belanja modal seperti pembangunan fasilitas seperti transportasi dan komunikasi, dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Investor cenderung memilih lokasi dengan ketersediaan prasarana yang memadai karena dapat menekan risiko serta mengurangi biaya operasional dalam kegiatan usaha (Awainah et al., 2024).

Dengan demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, yang kemudian meningkatkan pendapatan dan prospek keuntungan bagi pelaku usaha. Selain itu, pembangunan fasilitas oleh pemerintah dapat menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan efisiensi usaha dan menarik minat investor untuk meningkatkan investasi.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Belanja Pemerintah

A. Belanja Langsung

Menurut *Peraturan Menteri Dalam Negeri* (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, belanja langsung merupakan pengeluaran anggaran yang secara eksplisit berhubungan dengan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional, dengan memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan guna mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi dan tujuan SKPD.

Kegiatan dalam konteks ini diartikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD untuk mencapai target terukur dari suatu program. Kegiatan tersebut melibatkan serangkaian tindakan dalam pengerahan berbagai sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, barang modal (termasuk peralatan dan teknologi), dana, maupun kombinasi dari berbagai jenis sumber daya tersebut. Seluruh masukan (*input*) tersebut diarahkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa barang atau jasa.

Selanjutnya, sasaran (target) diartikan sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan suatu program atau keluaran yang diinginkan dari sebuah kegiatan.

Berdasarkan Permendagri tersebut, belanja langsung mencakup tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Belanja Pegawai, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok serta tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honorarium atas pelaksanaan kegiatan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran yang diperuntukkan bagi pembelian barang dengan masa manfaat kurang dari dua belas (12) bulan dan/atau penggunaan jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 3) Belanja Modal, yaitu yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan. Honorarium panitia pengadaan maupun biaya administrasi yang berkaitan dengan pembelian atau pembangunan aset tersebut dianggarkan dalam pos belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

B. Belanja Tidak Langsung

Menurut *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006*, belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah namun tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program maupun kegiatan tertentu. Klasifikasi belanja tidak langsung meliputi beberapa komponen utama sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja ini dialokasikan untuk menampung pengeluaran yang berkaitan dengan kompensasi dan penghasilan aparatur pemerintahan, termasuk gaji pokok serta tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji serta tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, dan honorarium atas pelaksanaan kegiatan tertentu.

2) Belanja Bunga

Jenis belanja ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga atas kewajiban utang pemerintah daerah, yang dihitung berdasarkan nilai pokok utang (*principal outstanding*) sesuai perjanjian pinjaman baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja ini dialokasikan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dengan tujuan memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima subsidi berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala daerah.

4) Belanja Hibah

Hibah digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu secara tidak mengikat dan tidak berkelanjutan. Pemberian hibah harus dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan penerima hibah, yang ditujukan untuk mendukung peningkatan fungsi pemerintahan daerah, pelayanan publik,

pelayanan dasar, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja ini dialokasikan untuk memberikan bantuan uang dan/atau barang kepada masyarakat secara tidak berulang dan bersifat selektif, dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan kepada partai politik.

6) Belanja Bagi Hasil

Komponen ini digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota, atau dari pendapatan kabupaten/kota yang dibagikan kepada pemerintah desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja ini mencakup bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang diberikan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, atau antar pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerataan dan/atau peningkatan kapasitas keuangan daerah penerima.

8) Belanja Tak Terduga

Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang bersifat insidental atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial. Termasuk di dalamnya pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya yang telah ditutup.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah atau provinsi dalam periode tertentu. Besaran PDRB mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. PDRB merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha barang dan jasa dalam suatu wilayah. Dengan demikian, PDRB dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi atau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah (BPS, 2025). Selain sebagai indikator kondisi ekonomi, PDRB juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas investasi dalam suatu wilayah.

Dalam pendekatan pendapatan nasional, PDRB dirumuskan sebagai $Y = C + I + G + (X - M)$, yang menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu komponen pembentuk output. Namun, dalam analisis ekonomi, hubungan tersebut juga dapat dilihat dari arah sebaliknya, yaitu bagaimana peningkatan PDRB (Y) dapat mempengaruhi investasi, yang tercermin dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang usaha yang mendorong pelaku usaha untuk menambah modal.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut melalui teori *accelerator* atau *principle of derived demand* yang dikembangkan oleh Bickerdike dan John Maurice Clark pada tahun 1910 (Sukirno, 2007:377). Teori ini menyatakan bahwa

permintaan terhadap barang modal merupakan turunan dari peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Dalam hal ini, peningkatan PDRB mencerminkan meningkatnya pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di pasar mengalami peningkatan.

Meningkatnya permintaan tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan jumlah produksi. Namun, ketika kapasitas produksi yang dimiliki tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, perusahaan akan menghadapi keterbatasan dalam proses produksi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan kapasitas produksinya melalui penambahan barang modal, seperti mesin, peralatan, dan fasilitas produksi lainnya. Penambahan barang modal ini merupakan bentuk investasi (Sukirno, 2007 dalam Masru'ah & Soejoto, 2013). Dengan demikian, berdasarkan teori *accelerator*, peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan investasi melalui mekanisme peningkatan permintaan yang diikuti oleh kebutuhan untuk memperluas kapasitas produksi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap investasi. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah PDRB diduga berpengaruh positif terhadap investasi.

Dalam penelitian ini, PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, karena menggambarkan perubahan output riil tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Menurut Badan Pusat Statistik (2025), PDRB atas

dasar harga konstan merupakan nilai produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar dengan penyesuaian indeks harga konsumen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Nilai tambah tersebut mencerminkan balas jasa atas kontribusi fakto-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk menghitung total output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, dapat digunakan tiga pendekatan perhitungan, yaitu:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi menggambarkan PDRB sebagai total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh barang dan jasa oleh berbagai unit produksi atau sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Setiap sektor ekonomi tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa subsektor. Dalam penyajiannya, unit-unit produksi dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha utama, yaitu:

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Penyediaan Listrik, Gas, dan Air Bersih
- e) Kontruksi
- f) Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- g) Pengangkutan dan komunikasi

h) Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

i) Jasa-jasa, termasuk Jasa Pemerintahan

2) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran mendefinisikan PDRB sebagai penjumlahan seluruh komponen permintaan akhir dalam suatu perekonomian. Komponen tersebut meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto yang merupakan selisih antara ekspor dan impor.

Namun demikian, investasi tidak hanya dipandang sebagai komponen output, melainkan juga sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Menurut Lipsey et al. (1992:108) investasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tetapi juga oleh tingkat aktivitas ekonomi yang tercermin dalam output atau PDRB. Peningkatan output menunjukkan adanya kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas produksi melalui peningkatan investasi. Secara matematis, hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai:

$$I = f(r, Y)$$

Di mana I adalah investasi, r adalah tingkat suku bunga, dan Y adalah tingkat output atau PDRB. Dengan demikian, peningkatan PDRB dapat mendorong peningkatan investasi, sehingga hubungan antara keduanya bersifat positif.

3) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan memandang PDRB sebagai total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi selama

periode tertentu. Balas jasa faktor produksi tersebut meliputi upah dan gaji sebagai imbalan tenaga kerja, sewa sebagai balas jasa atas penggunaan tanah, bunga sebagai imbalan modal, serta keuntungan sebagai balas jasa atas keterampilan dan kewirausahaan. Seluruh komponen pendapatan tersebut dihitung sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dan pendekatan perhitungan PDRB tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDRB mencerminkan total output dan nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah melalui pemanfaatan berbagai faktor produksi. Perubahan nilai PDRB tidak terlepas dari peran modal, tenaga kerja, teknologi, serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi aktivitas ekonomi regional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Aspek pembangunan manusia dapat diidentifikasi melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berfungsi sebagai alternatif indikator pembangunan selain Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai IPM suatu negara atau daerah mencerminkan tingkat pencapaian terhadap tujuan-tujuan pembangunan manusia, yang meliputi angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian, serta tingkat pengeluaran konsumsi yang mencerminkan standar hidup layak.

Lebih lanjut, IPM menjadi instrumen penting dalam menilai keberhasilan suatu negara atau daerah dalam meningkatkan kualitas penduduknya. Sebagai indeks komposit, IPM menggabungkan tiga dimensi utama dalam pembangunan

manusia, yakni usia harapan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*) (Salim, 2003:19).

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terdapat tiga komponen utama yang menjadi indikator untuk menilai tingkat pembangunan manusia di suatu negara, yaitu:

- 1) Aspek kesehatan, yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, sebagai representasi dari derajat kesehatan dan tingkat kematian bayi.
- 2) Aspek pendidikan, yang diukur berdasarkan tingkat melek huruf penduduk, rata-rata lama sekolah, serta tingkat pendidikan yang berhasil dicapai oleh masyarakat.
- 3) Aspek standar hidup layak, yang diukur melalui tingkat pengeluaran per kapita per tahun, sebagai cerminan dari kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Keterkaitan antara tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui indeks pembangunan manusia (IPM) dan investasi dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Becker (1993). Teori ini menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup merupakan bentuk investasi pada modal manusia (*human capital*) yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan berdampak pada efisiensi proses produksi serta peningkatan output ekonomi.

Dalam konteks investasi, daerah dengan tingkat IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih sehat, terdidik, dan produktif, sehingga mampu memberikan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) yang

lebih tinggi bagi investor. Kondisi ini membuat wilayah dengan IPM yang baik menjadi lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing, karena risiko usaha relatif lebih rendah dan prospek keuntungan lebih besar. Dengan demikian, IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia, tetapi juga berperan sebagai faktor penentu dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Oleh karena itu, berdasarkan *Human Capital Theory*, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang tercermin dalam IPM diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan peningkatan kualitas modal manusia, yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik suatu wilayah bagi investor. Pembangunan manusia tidak hanya dipahami sebagai hasil pembangunan, tetapi juga sebagai proses untuk memperluas pilihan dan kapasitas individu dalam menentukan kehidupan mereka. UNDP melalui *Human Development Report* mendefinisikan pembangunan manusia sebagai *a process of enlarging people's choices*. Dengan demikian, peningkatan IPM di suatu wilayah berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan investasi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis mengacu dari berbagai penelitian sebelumnya sebagai dasar penyusunan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Produk

Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Investasi di Wilayah Kalimantan Periode 2017-2024”. Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prima Rosita Arini, Manggar Wulan Kusuma (2019) Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening	Variabel (X): Belanja Modal	Variabel (X): Pendapatan Asli Daerah Variabel (Y): Investasi Swasta Variabel Intervening: Pertumbuhan Ekonomi Metode: <i>Partial Least Square</i> (PLS).	Belanja modal & investasi swasta memiliki hubungan positif dan signifikan. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Namun, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan. Sementara itu, PAD & pertumbuhan ekonomi sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta.	JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 1., Mei 2019
2.	Manggala Adi Windoro, Aditya Ardhi Nugroho, Ingelia Puspita (2023) Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah Konsolidasian, Indeks Pembangunan Manusia, dan	Variabel (X): Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Variabel (Y): Investasi Asing	Variabel (X): Ukuran Pasar	Belanja modal pemerintah daerah secara konsolidasian serta besaran ukuran pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai investasi asing. Namun, IPM tidak menunjukkan pengaruh terhadap investasi asing.	Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 4, No. 2, 142-156. ISSN PRINT: 2776-7256 ISSN ONLINE: 2775-5010

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Ukuran Pasar terhadap Investasi Asing di Indonesia	Metode: Regresi data panel			
3.	Mayisa Azahra Firdaus, Deky Aji Suseno (2025)	Variabel (X): Pengeluaran Pemerintah	Variabel (Y): Pertumbuha n Ekonomi	Pengeluaran pemerintah dan PMDN memiliki pengaruh langsung terhadap PDRB. Sebaliknya, PMA tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Selain itu, pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung terhadap PMA maupun PMDN. Namun, secara tidak langsung, pengeluaran pemerintah hanya memengaruhi PDRB melalui PMDN, sementara pengaruh tidak langsung melalui PMA tidak ditemukan.	EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajeme n, Akuntansi Volume 4, No.4, Mei 2025
	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi dan PDRB di Indonesia	Variabel (Y): Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing	Metode: <i>Structural Equation Modelling- Partial Least Square (SEM-PLS)</i>		
4.	Dedy Syahputra, Abubakar Hamzah, dan Muhammad Nasir (2017)	Variabel (X): PDB	Variabel (X): Suku Bunga, Partisipasi Angkatan Kerja	PDB, angkatan kerja, dan suku bunga riil berperan penting terhadap investasi swasta. Dalam jangka panjang, angkatan kerja memiliki pengaruh terbesar, sedangkan dalam jangka pendek, PDB dan suku bunga riil menjadi faktor yang paling menentukan, sementara pengaruh angkatan kerja tidak signifikan.	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussala m Volume 3 No. 1, ISSN. 2502-6976
	Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Riil, Dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia (Pendekatan ECM)		Variabel (Y): Investasi swasta Metode: <i>Error Corection Model (ECM)</i>		
5.	Clarisa Sasti Bintoro (2022)	Variabel (X): PDB	Variabel (X): Ekspor	Dalam jangka panjang, PDB tidak menunjukkan	Jurnal Economin

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia	Variabel (Y): Investasi Asing Langsung	Metode: <i>Error Corection Model</i> (ECM)	pengaruh yang signifikan terhadap FDI. Namun, dalam jangka pendek, PDB justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI. Selanjutnya, ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap FDI dalam jangka panjang, tetapi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dalam jangka pendek. Sementara itu, variabel angkatan kerja dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI, sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan.	a Volume 1, No. 3
6.	Rauzatul Jannah dan Asnaw (2019) Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Tahun 1990 – 2017	Variabel (X): Pertumbuha n Ekonomi Variabel (Y): Investasi	Variabel (X): Suku Bunga, inflasi, kurs Metode: Analisis Regresi linier berganda <i>time series</i>	Suku bunga dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap investasi, sedangkan kurs berpengaruh positif signifikan. Inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap investasi.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 2 Nomor 2, E-ISSN: 2615- 126X
7.	Ayu Maulidhia Choirunnisa, Rifki Khoirudin (2024) Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Jumlah Penduduk,	Variabel (X): Pertumbuha n Ekonomi dan Indeks Pembangun an Manusia (IPM) Variabel (Y):	Variabel (X): Upah Minimum Kota, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Upah Minimum Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMA, sedangkan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, IPM serta jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PMA, dan TPAK	Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, No. 12, 327-334 E- ISSN: 3025-6704

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	TPAK Terhadap Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Penanaman Modal Asing	Metode: <i>GMM Two-Step</i>	menunjukkan pengaruh positif terhadap PMA.	
8.	Isna Diyah Noviani, Nurul Istifadah (2020) Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah (Infrastruktur) Terhadap Investasi di Indonesia	Variabel (X): Pengeluaran pemerintah Variabel (Y): Investasi	Variabel (X): Tenaga Kerja Metode: OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh signifikan serta positif terhadap investasi.	<i>MediaTrend</i> 15 (2) 2020, 283-290
9.	Yevi Dwitayanti, Bernadette Robiani, Mukhlis dan Siti Rohima (2024) Determinan Investasi di Indonesia	Variabel (X): Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Variabel (Y): Investasi	Variabel (X): Persentase tenaga kerja formal Metode: Analisis Regresi linier berganda <i>time series</i>	IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan proporsi tenaga kerja formal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap investasi.	Jurnal Proaksi, Volume 11, No. 1, 184–200.
10.	Krishna Putra Natio, Jannah Saddam Ash Shidiqie (2023) Faktor faktor yang memengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di Nusa Tenggara Barat 2014-2022	Variabel (X): Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Variabel (Y): <i>Foreign Direct Investment</i>	Variabel (X): Tingkat Pengangguran, Inflasi Metode: <i>First-Difference Generalized Method of Moments and System</i>	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI dalam jangka pendek maupun panjang. Sebaliknya, IPM dan tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI baik dalam jangka pendek maupun panjang.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2 Issue 1, 2023: 86-91

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			<i>Generalized Method of Moments</i>		
11.	Rizqi Muzakki, & Sukim (2022) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Foreign Direct Investment di Luar Jawa-Bali Tahun 2011- 2020	Variabel (X): PDRB, Indeks Pembangun an Manusia (IPM) Variabel (Y): <i>Foreign Direct Investment</i> Metode: Regresi data panel	Variabel (X): Inflasi, Infrastruktur , Tenaga Kerja, dan Ekspor	Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap FDI adalah PDRB, inflasi, IPM, dan ekspor, sedangkan tenaga kerja dan infrastruktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.	Seminar Nasional <i>Official Statistics</i> , Vol. 1, 1073-1082.
12.	Rifki Ananta (2023) Analisis Determinan Pananaman Modal Asing (PMA) Di Wilayah Subosukawonos raten Tahun 2018-2022	Variabel (X): PDRB Variabel (Y): Penanaman Modal Asing	Variabel (X): Upah Minimum Kabupaten/ Kota, Rata- rata lama sekolah, dan Angkatan Kerja	Rata-rata lama sekolah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA, sedangkan angkatan kerja serta upah minimum kabupaten/kota tidak menunjukkan pengaruh.	Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausa haan, Vol. 14, No. 7, p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN: 2809-8862
13.	Ahmad Nurkhin, Yozi Aulia Rahman, Ahmad Syahrul Fauzi, Kusumantoro, Algifari (2024) Analisis Determinan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia	Variabel (X): PDRB, Belanja Modal, Indeks Pembangun an Manusia (IPM) Variabel (Y): <i>Foreign Direct Investment</i>	Variabel (X): Upah minimum provinsi, APBD, Ekspor, Impor, dan Jumlah Angkatan Kerja Metode: Regresi data panel	PDRB dan ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap FDI. Variabel lain seperti IPM, UMP, angkatan kerja, anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD), belanja modal, dan impor tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI.	Jurnal Economi & Pendidikan , Volume 21, No. 2

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
14.	Tania Melinda Dewi, Hendry Cahyono (2016) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia	Variabel (X): Pertumbuhan Ekonomi Variabel (Y): Investasi Asing Langsung	Variabel (X): BI-Rate dan Inflasi Metode: Analisis Regresi linier berganda <i>time series</i>	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap investasi asing langsung, sementara BI Rate berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap investasi asing langsung.	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE). Volume 4, No. 3
15.	Enni Sari Siregar (2016) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara	Variabel (X): Pengeluaran Pemerintah Variabel (Y): Investasi Daerah	Metode: <i>Correlation formula " r " by Pearson product moment.</i>	Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi.	Jurnal <i>Education and developme nt</i> STKIP Tapanuli Selatan Volume 2 No.2
16.	Beatriks Sefle, Amran Naukoko dan George Kawung (2014) Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Kabupaten Sorong (Studi Pada Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012)	Variabel (X): PDRB Variabel (Y): Investasi	Metode: Analisis Regresi linier berganda <i>time series</i>	Variabel berpengaruh terhadap investasi. PDRB	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14, No. 3
17.	Ameliani Eka Saputri, Zamruddin Hasid, Akhmad Noor (2019)	Variabel (X): Pengeluaran Pemerintah	Variabel (X): Suku Bunga dan Inflasi Variabel (Y):	Suku bunga berpengaruh positif signifikan dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap investasi swasta, sedangkan variabel inflasi	Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarm an (JIEM); Volume 4, No. 4

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta di Kalimantan Timur		Investasi Swasta Metode: Analisis Regresi linier berganda <i>time series</i>	tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap investasi swasta.	
18.	Prince Charles Heston Runtunuwu (2021) <i>Relationship Economic Growth with Foreign Direct Investment</i>	Variabel (X): Pertumbuhan Ekonomi Variabel (Y): Foreign Direct Investment	Metode: <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL)	Dalam jangka panjang maupun jangka pendek, terdapat hubungan timbal balik yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan PMA, di mana kedua variabel saling memengaruhi satu sama lain.	<i>Journal Of International Conference Proceedings</i>
19.	Hijri Juliansyah, Suprianti, dan Fanny Nailufar (2021) <i>Influence Of Saving and Economic Growth On Investment in Indonesia The Period Of 1990-2019</i>	Variabel (X): Pertumbuhan Ekonomi Variabel (Y): Investasi	Variabel (X): Tabungan Metode: VECM (<i>Vector Error Correction Model</i>)	Dalam jangka pendek dan jangka panjang, tabungan tidak berpengaruh terhadap investasi, sedangkan dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap investasi, namun dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif & signifikan terhadap investasi.	<i>Journal of Malikussaleh Public Economics</i> , Volume 04 Nomor 02 E-ISSN: 2614-4573
20.	Tracy Patricia Nindry Abigail Rolnmuch, Yuhana Astuti (2024) <i>Analysis of Factors Affecting the Entry of Foreign Direct</i>	Variabel (X): Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel (X): Faktor Listrik Variabel (Y): FDI di Industri Pertambangan, FDI di Industri Logam	Faktor kelistrikan tidak berpengaruh terhadap arus FDI di ketiga sektor industri. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap FDI di sektor pertambangan, namun berpengaruh positif signifikan pada sektor logam dasar, barang	<i>Eternal Scientific Publications</i> ISSN: 2583 – 5238 / Volume 3 Issue 7 July 2024 / Pg. No: 312-320

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	<i>Investment into Indonesia (Case Study of Three Industrial Sectors in Indonesia)</i>		Dasar, Non-Mesin, dan Peralatan, FDI di Industri Listrik, Gas, dan Air Metode: <i>Ordinary Least Squares (OLS)</i>	logam, non-mesin, dan peralatan. Adapun pada sektor listrik, gas, dan air, IPM tidak menunjukkan pengaruh terhadap FDI di Indonesia.	

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2023:95), yang mengutip pandangan Uma Sekaran (1992), kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang relevan dalam suatu permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagai variabel terikat sedangkan belanja pemerintah, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel bebasnya. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti:

2.2.1 Hubungan Belanja Pemerintah terhadap Penanaman Modal Asing

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai instrumen penggerak perekonomian. Dalam konteks penanaman modal asing (PMA), besaran dan efektivitas belanja pemerintah dapat menjadi faktor kunci yang menentukan daya tarik suatu wilayah bagi investor asing. Pemerintah yang aktif mengalokasikan anggaran untuk

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi, sedangkan stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan fiskal yang baik dapat memberikan kepastian bagi investor dalam menanamkan modalnya.

Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, pengaruh belanja pemerintah dapat dijelaskan melalui teori *crowding in effect*. Konsep ini menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, dapat mendorong peningkatan investasi, termasuk investasi asing. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan permintaan agregat, memperbaiki iklim usaha, serta menciptakan peluang keuntungan yang lebih besar bagi investor.

Penelitian empiris juga mendukung pandangan tersebut. Windoro et al. (2023) menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah, khususnya pada sektor jalan, irigasi, dan jaringan, memiliki pengaruh positif terhadap penanaman modal asing di Indonesia selama periode 2012-2021. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur fisik mampu menarik minat investor asing karena memberikan kemudahan akses distribusi dan menurunkan biaya operasional.

Selain itu, penelitian Tamba et al. (2023) juga menjelaskan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dapat memperbaiki iklim investasi, meskipun pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada sektor ekonomi dan konteks wilayahnya. Hal ini menegaskan bahwa peran belanja pemerintah dalam

mendorong PMA tidak hanya bergantung pada besarannya, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dialokasikan dan diimplementasikan.

Berdasarkan uraian teori dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah memiliki hubungan positif terhadap penanaman modal asing (PMA). Semakin efektif dan produktif belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pelayanan publik, maka semakin besar pula potensi peningkatan investasi asing di suatu daerah. Dengan kata lain, peningkatan belanja pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang menarik, memperkuat kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aliran modal asing.

2.2.2 Hubungan Belanja Pemerintah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri

Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi domestik dan mendorong partisipasi pelaku usaha dalam negeri. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengarahkan pengeluaran publik ke sektor-sektor produktif yang mampu memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan peluang investasi baru. Salah satu bentuk kebijakan fiskal tersebut adalah pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), yang diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, terutama jika difokuskan pada bidang pembangunan dan infrastruktur (Asahdi et al., 2015). Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya produksi, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha domestik, sehingga mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Secara teoritis, pengaruh belanja pemerintah dapat dijelaskan melalui teori *crowding in effect*. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, dapat mendorong peningkatan investasi, termasuk investasi domestik. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan permintaan agregat, memperbaiki iklim usaha, serta menciptakan peluang keuntungan yang lebih besar bagi investor.

Secara empiris, Firdaus dan Suseno (2025) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan produktif bagi seluruh pelaku investasi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Siregar (2016) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi daerah di Sumatera Utara. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi komitmen pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan, semakin besar pula minat investor domestik untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengeluaran publik yang diarahkan secara tepat, khususnya pada sektor pembangunan, mampu menciptakan efek berganda dalam perekonomian daerah, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan

kepercayaan investor domestik untuk berinvestasi. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan belanja pemerintah menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat kinerja investasi dalam negeri di Wilayah Kalimantan.

2.2.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap PMA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Semakin tinggi PDRB, semakin besar pula potensi wilayah tersebut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi serta daya tarik bagi investor. Peningkatan PDRB sering kali diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan daya beli masyarakat yang meningkat seluruhnya merupakan faktor yang dapat meningkatkan minat investasi, termasuk investasi asing.

PDRB memiliki hubungan positif terhadap investasi. Menurut Sukirno (2004), peningkatan pendapatan nasional akan diikuti oleh peningkatan kegiatan investasi. Hal ini dapat dijelaskan melalui *teori accelerator*, yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong meningkatnya kebutuhan akan barang modal. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Apabila kapasitas produksi yang ada tidak mencukupi, maka perusahaan akan melakukan penambahan modal melalui kegiatan investasi.

Hasil penelitian empiris mendukung pandangan tersebut. Natio dan Shidiqie (2023) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB

di suatu wilayah mampu meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi daerah tersebut. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Runtunuwu (2021) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PMA. Artinya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang masuknya modal asing karena investor cenderung mencari daerah dengan prospek ekonomi yang menjanjikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan PMA. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin kuat sinyal ekonomi yang dikirimkan kepada investor asing mengenai stabilitas dan potensi keuntungan investasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam menarik dan mempertahankan investasi asing di tingkat regional.

2.2.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap PMDN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut sedang tumbuh dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan produktivitas serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga mendorong kepercayaan investor domestik untuk menanamkan modalnya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB, semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan positif terhadap investasi, dimana peningkatan pendapatan nasional akan mendorong peningkatan investasi (Sukirno, 2004). Hal ini dapat dijelaskan melalui *teori accelerator*, yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi akan mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap barang modal. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, pelaku usaha dalam negeri akan menghadapi peningkatan permintaan, sehingga terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksi. Apabila kapasitas produksi yang ada tidak mencukupi, maka pelaku usaha akan melakukan penambahan modal melalui kegiatan investasi domestik.

Temuan empiris mendukung hubungan tersebut. Penelitian oleh Syahputra et al. (2017) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan faktor yang paling menentukan bagi investasi swasta dalam jangka pendek. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dapat memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha domestik untuk menanamkan modalnya. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah et al. (2021) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap investasi dalam jangka pendek, namun memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dampak pertumbuhan ekonomi terhadap investasi tidak selalu langsung terasa, dalam jangka panjang peningkatan PDRB tetap mampu memperkuat kepercayaan dan minat investor dalam negeri untuk berinvestasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha domestik bahwa kegiatan investasi di daerah tersebut memiliki prospek yang menguntungkan. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan peningkatan PDRB menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi investasi domestik di tingkat regional.

2.2.5 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PMA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam konteks penanaman modal asing (PMA), IPM menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan investor asing dalam menentukan lokasi investasi. Daerah dengan tingkat IPM yang tinggi umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Hubungan antara IPM dan PMA dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Becker (1993). Teori ini menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup merupakan bentuk investasi pada modal manusia (*human capital*) yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut berdampak pada efisiensi proses produksi, penurunan biaya operasional, serta peningkatan output ekonomi. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan sehat, perusahaan dapat

mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya saing dan keuntungan usaha.

Dalam perspektif investasi asing, wilayah dengan tingkat IPM yang lebih tinggi cenderung menawarkan tenaga kerja yang terdidik, sehat, dan produktif, yang pada akhirnya mampu memberikan tingkat pengembalian investasi (return on investment) yang lebih besar bagi investor. Kondisi ini membuat daerah dengan IPM yang baik menjadi lebih menarik bagi investor asing karena risiko usaha relatif lebih rendah dan prospek keuntungan lebih menjanjikan. Dengan demikian, IPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia, tetapi juga sebagai determinan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sejumlah penelitian empiris telah mengkaji hubungan antara IPM dan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Muzzaki dan Sukim (2022) menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap investasi, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu mendorong masuknya investasi, termasuk penanaman modal asing. Hasil ini sejalan dengan *Human Capital Theory* yang menekankan pentingnya kualitas manusia sebagai faktor pendukung utama kegiatan ekonomi dan investasi. Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Natio dan Shidiqie (2023) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap investasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM tidak selalu secara langsung mendorong masuknya investasi asing, terutama jika peningkatan kualitas manusia tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, kesiapan sektor industri, maupun kebijakan investasi yang mendukung. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

pengaruh IPM terhadap PMA bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah serta struktur perekonomian yang berbeda.

Berdasarkan uraian teori dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan terhadap penanaman modal asing (PMA). Secara teoritis, peningkatan IPM diharapkan mampu menarik investasi asing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Namun, secara empiris, pengaruh IPM terhadap PMA dapat bervariasi, tergantung pada kondisi ekonomi daerah, kesiapan sektor produksi, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang tepat agar mampu mendorong masuknya penanaman modal asing secara optimal.

2.2.6 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PMDN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam konteks penanaman modal dalam negeri (PMDN), IPM memiliki peran strategis karena mencerminkan kesiapan tenaga kerja dan kualitas lingkungan sosial-ekonomi yang menjadi pertimbangan utama investor domestik dalam menentukan lokasi investasinya. Daerah dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan adaptif, sehingga mampu mendukung keberlangsungan dan efisiensi kegiatan usaha.

Hubungan antara IPM dan PMDN dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Becker (1993). Teori ini menyatakan bahwa investasi pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup merupakan

bentuk investasi pada modal manusia (*human capital*) yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan berdampak pada efisiensi proses produksi, peningkatan output, serta penurunan biaya operasional dalam jangka panjang. Dengan demikian, kualitas modal manusia yang tercermin dalam IPM menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas investasi, termasuk investasi domestik.

Dalam perspektif investor dalam negeri, daerah dengan tingkat IPM yang lebih tinggi cenderung menawarkan tenaga kerja yang lebih terampil, sehat, dan produktif, sehingga mampu meningkatkan kinerja usaha dan memberikan tingkat keuntungan yang lebih optimal. Kondisi ini menjadikan wilayah dengan IPM yang baik lebih menarik bagi penanam modal dalam negeri karena risiko usaha relatif lebih rendah dan keberlanjutan kegiatan ekonomi lebih terjamin. Oleh karena itu, IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia, tetapi juga menjadi salah satu determinan utama dalam menciptakan iklim investasi domestik yang kondusif.

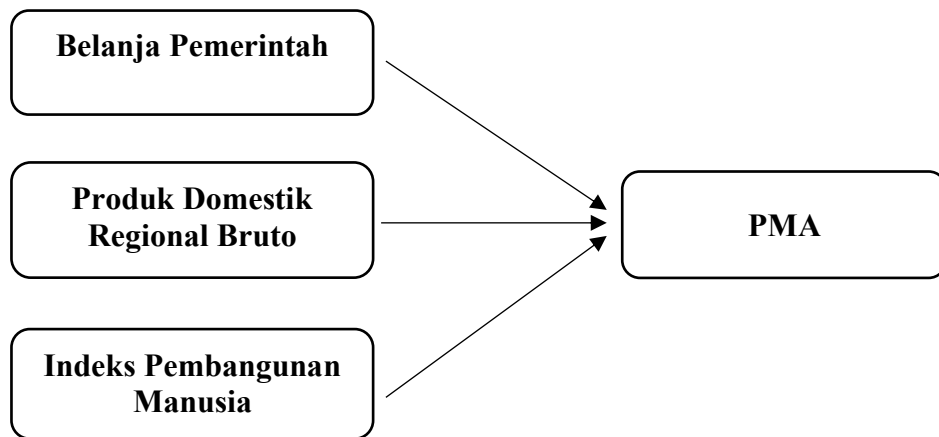
Penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan antara IPM dan investasi. Dwitayanti et al. (2024) menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum mampu mendorong pertumbuhan investasi domestik, karena tenaga kerja yang berkualitas menjadi faktor pendukung utama bagi keberhasilan kegiatan usaha dan ekspansi ekonomi daerah.

Namun demikian, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Natio dan Shidique (2023) menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung (FDI) di Nusa Tenggara Timur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, penelitian oleh Rolnmuch dan Astuti (2024) menunjukkan bahwa pengaruh IPM terhadap investasi bersifat sektoral. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI di sektor pertambangan, namun berpengaruh positif signifikan pada sektor logam dasar, barang logam, non-mesin, dan peralatan. Sementara itu, pada sektor listrik, gas, dan air, IPM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap FDI di Indonesia. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh IPM terhadap investasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik sektor dan struktur perekonomian daerah.

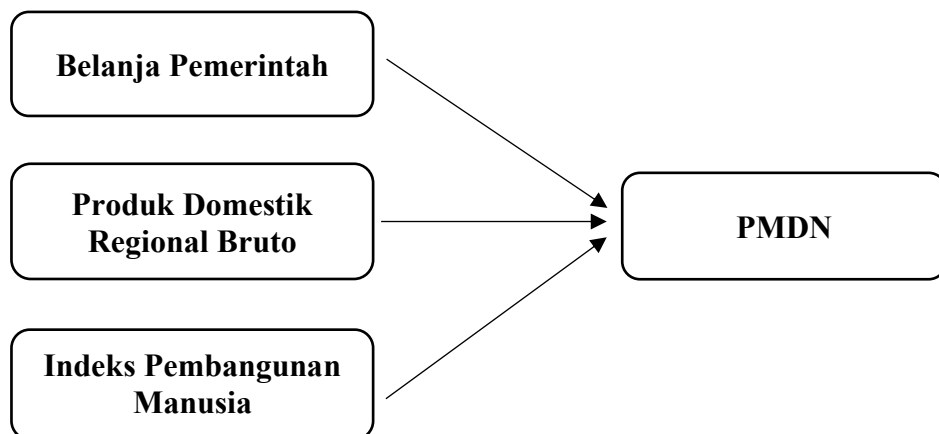
Berdasarkan uraian teori dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN). Secara teoritis, peningkatan IPM diharapkan mampu mendorong PMDN melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Namun, secara empiris, pengaruh IPM terhadap investasi dapat bervariasi, tergantung pada sektor ekonomi, karakteristik wilayah, serta kesiapan struktur produksi. Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu diiringi dengan pengembangan sektor usaha dan kebijakan investasi yang tepat agar mampu mendorong pertumbuhan PMDN secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran Teoritis Model PMA



Gambar 2.2 Paradigma Pemikiran Teoritis Model PMDN



2.3 Hipotesis

- 1) Diduga secara parsial Belanja pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap PMA di Wilayah Kalimantan.
- 2) Diduga Belanja pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan berpengaruh terhadap PMA di Wilayah Kalimantan.

- 3) Diduga secara parsial Belanja pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap PMDN di Wilayah Kalimantan.
- 4) Diduga Belanja pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan berpengaruh terhadap PMDN di Wilayah Kalimantan.